

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah propinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pungutan berupa perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Pemerintahan daerah memiliki masing-masing tujuan dalam mengatur pemerintahannya. Otonomi daerah yang merupakan tujuan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh melalui sumber-sumber dana dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki suatu daerah dapat memperlihatkan perkembangan dan kemandirian daerah tersebut. Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil. Sebaliknya, apabila mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi belum maksimal dalam mengelola otonomi daerahnya.

Pajak daerah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat. Maka dengan mengoptimalkan potensi pajak yang ada di daerah

otonom, maka nilai dari pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan yang nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak yang bisa dipungut oleh daerah kabupaten atau kota ada 11 yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya.

Pemerintah Daerah Kota Batu sejak tahun 2001 merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satu upaya pemerintahan setempat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan daerah Kota Batu berasal dari sektor pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sumber pendapatan berasal dari sektor Retribusi Daerah antara lain Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sumber Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kota Batu porsi terbesar disumbangkan oleh Pajak

Daerah yaitu diatas 70%, yang kemudian diikuti oleh Retribusi Daerah. Dari tahun ke tahun Pajak Daerah Kota Batu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akan tetapi, dalam berita yang diedarkan tahun 2018 Pemerintahan Kota Batu tidak mencapai target dalam penerimaan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Penerimaan yang diperoleh mencapai 134 Milliar dengan persentase 82% dari target. Sedangkan, target yang di tetapkan tahun 2018 mencapai 163 Milliar. Dalam upaya meningkatkan kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jatim III dengan Pemkot Batu melakukan kerjasama di tahun 2019 yang dinamakan MoU (Memorandum of Understanding) yang menekankan pada optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah agar penerimaan pajak kembali memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi kepada pengusaha dan pedagang kecil, Menggali potensi pajak yang belum optimal akan dioptimalkan, dan melakukan pelatihan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustin (2016) tentang analisis tingkat keberhasilan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Batu Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini Rasio Efektivitas, Rasio Kontribusi, dan Rasio Pertumbuhan saling berkaitan. Antara target dan realisasi perbedaannya tidak jauh berbeda dan rata-rata tiap tahun mengalami kenaikan tetapi pada Rasio Pertumbuhan yang hasil rata-ratanya banyak mengalami keminsuan yang salah satunya pada Pajak Hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan melengkapi penelitian sebelumnya yaitu menganalisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan perhitungan efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan penelitian ini yaitu Pajak Daerah yang akan diteliti terdapat Sembilan jenis Pajak Daerah yang diakui oleh Kota Batu sedangkan pada penelitian sebelumnya terdapat enam jenis Pajak Daerah. Pada tahun penelitian sebelumnya 2011-2013 selama tiga tahun sedangkan penelitian ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang akan diteliti 2015-2018 selama empat tahun. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu menganalisis efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah yang khususnya dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Batu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Batu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kota Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut : 1) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batu. 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu. 3) Bagi Pemerintahan Kota Batu, dapat dijadikan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kota Batu untuk mengambil langkah-langkah perbaikan bagi kemajuan kinerja Pemerintahan Daerah dalam upaya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah. 4) Bagi penelitian dan akademis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat digunakan sebagai referensi perluasan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.